



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

HUKUM NIKAH ULANG WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN ULAMA ASTANAJAPURA

**(Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten
Cirebon)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

oleh :

FARHATUL AENI
NIM 14112140039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

SYEKH NURJATI CIREBON

2015 M / 1437 H



ABSTRAK

FARHATUL AENI
NIM. 14112140039

: *“Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)”*

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang setiap orang mendambakannya terjadi hanya sekali seumur hidup. Dalam hukum Islam pernikahan dapat dilaksanakan kembali setelah adanya perceraian. Namun beda halnya dengan kasus yang terjadi di Desa Astanajapura, nikah ulang yang terjadi di Desa Astanajapura dilakukan tanpa perceraian terlebih dahulu. Pada pernikahan pertama saat wanita tersebut hamil duluan kemudian menikah hanya untuk menutupi aib dirinya dan keluarga, kemudian setelah dia lahir mereka melakukan pernikahan yang kedua. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan mereka terhadap kabar yang ada sehingga mereka beranggapan bahwa jika nikah dalam keadaan hamil merupakan pernikahan yang tidak sah. Fenomena tersebut sering terjadi di masyarakat Astanajapura yang pada dasarnya lingkungan masyarakat yang agamis dan sangat kental dengan budayanya semakin hari semakin merosot nilai-nilai moral dan keagamaannya, mereka beranggapan bahwa jika mengawini wanita hamil itu tidak boleh, akhirnya mereka melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir dan seolah-olah agar nasabnya itu bisa ke bapaknya.

Masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana hukumnya nikah ulang menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan fiqih? dan (b) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan KUA terhadap pelaksanaan nikah ulang?

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui hukum nikah ulang menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Fiqih, (2) Menganalisis pandangan tokoh masyarakat dan KUA setempat terhadap pelaksanaan nikah ulang.

Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kawin hamil di luar nikah. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu menurut KHI yaitu berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 yang menegaskan bahwa “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Jadi jika seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil, maka tidak perlu diadakannya nikah ulang. Sedangkan menurut ulama Desa Astanajapura juga berpendapat bahwa nikah ulang itu dibolehkan asal dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan untuk menguatkan pernikahan yang pertama tetapi anaknya tetap dihukumi anak diluar nikah dan tidak bisa dinasabkan pada ayahnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "HUKUM NIKAH ULANG WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN ULAMA ASTANAJAPURA (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)" oleh Farhatul Aeni, NIM. 14112140039 telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal Febuari 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari'ah.

Cirebon, 25 Juni 2015

Sidang Munaqosah

Ketua,
Merangkap Anggota



Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris,
Merangkap Anggota

Ahmad Rofii, M.A
NIP. 19760725 200112 1 002

Anggota

Penguji I,

Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji II,

H. Hmam Bustoni, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian	16



G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Tujuan Pernikahan.....	27
3. Hukum Pernikahan	30
4. Syarat dan Rukun Pernikahan	35
5. Hikmah Pernikahan	40
B. Tinjauan Umum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.....	41
1. Pengertian Wanita Hamil di Luar Nikah.....	41
2. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut KHI .	42
3. Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fiqih	47
BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA ASTANAJAPURA	55
A. Sejarah Desa Astanajapura.....	55
B. Letak Geografis	63
C. Kondisi Sosial dan Budaya	68
D. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Astanajapura.....	73
BAB IV PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH	
 DI DESA ASTANAJAPURA	82
A. Pengertian Pernikahan Ulang Wanita Hamil di Luar	82
B. Proses Pernikahan Ulang Wanita Hamil di Luar	84
C. Analisis Hukum Pernikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah.....	86
1. Nikah Hukum Nikah Ulang Menurut KHI.....	86



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Nikah Hukum Nikah Ulang Menurut Ulama Desa Astanajapura 89

BAB V PENUTUP 101

- A. Kesimpulan..... 101

- B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata nikah berarti *ad-ḍammu* dan *al-jam'u* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwīj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang artinya bersetubuh. Menurut Rahmat Hakim kata nikah berasal dari bahasa arab *nikāhun*, yang merupakan masdar dari *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.¹

Sedangkan secara terminologi pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan bab 1 tentang pernikahan pasal 1 menyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), cet. ke-2, hal. 7

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 11

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Di dalam KHI di jelaskan tentang pengertian pernikahan dalam pasal 2, “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang menghalalkan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral. Dan oleh karena itu pula, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melibatkan kedua belah pihak keluarga mempelai.

³ Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CITRA UMBARA, 2013), Cet. Ke- 4, hal. 2

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 30



Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan serta untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman. Kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai Islam.

Seiring dengan kemajuan zaman, di mana kehidupan sudah modern dan berkembang pesat, berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat, serta arus informasi yang semakin canggih, sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya para remaja. Kenyataan ini dilihat dengan semakin membludaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah sehingga ada juga yang melakukan nikah ulang yang terjadi di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Hal ini terjadi dengan awal mulanya adalah dari pengenalan antar mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dapat lebih dari sebatas teman atau sahabat. Bahkan ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Dua remaja yang menjalin kasih seperti ini juga dapat dikatakan mengikuti mode atau *trend* yang diadopsi dari gaya barat. Pacaran yang menjadi permasalahan remaja sekarang yaitu dengan pembuktian dan ketulusan. Pembuktian yang mereka artikan yaitu jika tidak melakukan hubungan intim maka tidak dikatakan tulus dan ada juga mereka melakukan perbuatan zina agar hamil dan orang tua mereka menikahkannya.



Meskipun demikian, hal ini sama sekali tidak berarti terbebaskannya pelaku perzinahan dari dosa dan murka Tuhan, sebagaimana tidak pula terbebaskannya anak yang dilahirkan dan kemungkinan dampak pada psikologis yang negatif terhadap perkembangan jiwanya.⁵

Istilah pernikahan wanita hamil adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa ‘iddah karena pernikahan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.⁶

Pernikahan wanita hamil di luar nikah disebabkan karena si pria dituntut paksa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum menikah, selain itu juga untuk menutup malu dan aib keluarga. Sehingga diharapkan dapat memperbaiki nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus-menerus.⁷ Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 256

⁶ [http : //www.Rumahfiqih.Com/ust/e2.Php?id=1165371156](http://www.Rumahfiqih.Com/ust/e2.Php?id=1165371156), diakses tanggal 23 September 2014, jam 20:00

⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al hadisah*, (Jakarta: Persada, 1995), hal. 5



musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengisyaratkan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.⁸

Fenomena nikah ulang yang terjadi di Desa Astanajapura sering terjadi, hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika mengawini wanita hamil itu tidak boleh, akhirnya mereka melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir dan seolah-olah agar nasabnya itu bisa ke bapaknya.

Adapun menurut kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan pada saat si wanita dalam keadaan hamil, harus melakukan akad nikah kembali pasca kelahiran sang anak.

Menurut bapak Slamet selaku perangkat Desa setempat bahwa kasus pernikahan ulang itu memang ada dan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka akan hukumnya nikah ulang tersebut serta dampaknya, alhasil mereka melakukan nikah ulang karena apa kata orang-orang sekitar dan juga termasuk apa kata orang tua pelaku.

Meskipun demikian, pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah adalah pernikahan yang pertama yaitu yang ketika wanita itu masih dalam keadaan hamil. Dan pernikahan yang kedua mereka lakukan dengan sembunyi-

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), hal. 165





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sembunyi termasuk tidak dihadiri oleh pembantu pegawai pencatat nikah yaitu ketika wanita itu sudah melahirkan.

Berdasarkan keterangan dari bapak H. A. Hafid selaku kepala KUA Astanajapura tidak ada nikah ulang ataupun tidak pernah melakukan nikah ulang sekalipun wanita itu dalam keadaan hamil. Karena mereka berpatokan pada KHI yang tertulis tidak perlu mengadakan nikah ulang. Adapun nikah ulang yaitu hanya *isbat*⁹ nikah saja.

Dalam hukum pernikahan Islam, pernikahan bisa dilakukan lagi apabila pasangan tersebut sudah bercerai, jika masih dalam keadaan ‘*iddah* pada talak *raj’i* maka pasangan tersebut boleh kembali (rujuk) tanpa melakukan akad yang baru. Tetapi jika istri sudah ditalak *ba’in sughra* maka harus menikah dulu dengan orang lain sebagaimana layaknya pasangan suami istri (muhallil) kemudian cerai lalu kembali lagi ke pasangan yang pertama.

Dari kejadian ini penyusun berusaha untuk melihat realita nikah ulang wanita hamil di luar nikah yang dengan tanpa melakukan perceraian mereka melakukan nikah ulang yang berada di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon yang masih terlihat kental dengan budaya Islami, di mana Desa Astanajapura ini merupakan suatu daerah yang banyak terdapat tempat pengajian dan terdapat pondok pesantren. Kasus ini membutuhkan kepastian hukum, serta penyusun berusaha meneliti pernikahan ulang yang dilakukan oleh pihak KUA apakah sudah sejalan dengan hukum

⁹ Penetapan pernikahan

Islam atau belum. Kemudian penyusun juga berusaha untuk melihat di lapangan langsung bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang terjadinya kawin ulang karena hamil di luar nikah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, dan untuk membatasi skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukumnya nikah ulang menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ulama Astanajapura?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan KUA terhadap pelaksanaan nikah ulang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui hukum nikah ulang menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ulama Astanajapura
- b. Menganalisis pandangan tokoh masyarakat dan pihak KUA setempat terhadap pelaksanaan nikah ulang





2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menambah karya juga menambah wawasan mengenai hukumnya pernikahan ulang.
- b. Kepada masyarakat diharapkan mengetahui apa hukumnya pernikahan ulang yang dilakukan tanpa perceraian terlebih dahulu.
- c. Kegunaan akademik, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka seperti buku, makalah atau skripsi, penulis belum menemukan penelitian yang mengangkat tema ini secara mendetail. Dengan demikian, tidak dikhawatirkan akan terjadi duplikasi dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan hukum nikah ulang wanita hamil di luar nikah. Adapun yang pernah meneliti adalah sebagai berikut:

Skripsi Muh. Nur Syifa dengan judul Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007 Dalam Tinjauan Hukum Islam. Meneliti secara langsung ke dalam masyarakatnya dan juga proses pelaksanaan kawin hamil tersebut di KUA Kecamatan Imogiri. Karena di dalam KUA sendiri masih ada beberapa permasalahan mengenai pernikahan hamil tersebut.

Skripsi Tia Nopita Yanti dengan judul Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi). Penulis berpendapat bahwa maraknya pernikahan hamil di luar nikah karena tidak adanya kepastian hukum yang menjerat pelaku pernikahan hamil tersebut.

E. Kerangka Teori

Menurut Prof. Dr. Tihami mengartikan pernikahan secara terminologi ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera.¹⁰

Menurut para *fuqaha* (ahli fiqih) dan empat madzhab sepakat bahwa makna pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti sahnyanya hubungan suami istri. Dengan demikian pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan suami istri untuk melanjutkan keturunan.¹¹

Pernikahan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil di dalam akad yang sah ditalak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 :

¹⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, hal. 9

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqih Munakahat*, hal. 8



وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi dan antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya terdapat dalam PP. No. 9 tahun 1975, ditambah dengan Inpres No. 1 tahun 1991 yaitu tentang KHI di Indonesia. Sedang syarat materialnya adalah harus terpenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang pernikahan maupun PP, serta ketentuan lainnya.

Pernikahan ulang wanita hamil yang terjadi di wilayah Astanajapura-Cirebon dapat terjadi atas dua kemungkinan, yaitu pernikahan yang terjadi antara wanita hamil dengan pria yang menghamilinya atau dengan kawan zinanya atau pernikahan wanita hamil dengan pria lain yang bukan menghamilinya. Dalam hal pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, Islam membolehkan sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Nur ayat 3 karena cara inilah yang



terbaik dan maksimal, untuk dapat memperbaiki nama baik pelaku zina maupun keturunannya.

KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil. Mengenai kebolehan juga dimuat dalam pasal 53 (1) KHI di Indonesia BAB VII tentang nikah hamil, yang terdiri dari tiga ayat:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.¹²

Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 53 Ayat 1, KHI(Kompilasi Hukum Islam) membatasi masalah pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya.

Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dihukumkan zina, jika wanita yang berbuat zina itu hamil, maka para imam madzhab fikih berbeda pendapat, apakah wanita yang hamil itu boleh dinikahi atau tidak. Ada diantara pendapat imam madzhab yang membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Tetapi adapula pendapat imam

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53



madzhab yang tidak membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan pernikahannya.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan wanita hamil telah mendapat tempat pada BAB VIII Pasal 53 Ayat 1, 2, 3 dan membolehkannya wanita hamil melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Jika nikah hamil dilangsungkan, maka timbul persoalan lain, yaitu tentang status anak yang dikandung oleh wanita tersebut, apakah status nasab dihubungkan kepada ibunya ataukah kepada orang yang mengawini.

Sementara itu, Hanafi, Imamiyah, dan Hambali menyatakan anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Dari segi bahasa dan tradisi masyarakat ('Urf) dia adalah anaknya sendiri. Tidak diakuinya ia sebagai anak oleh *syar'i* dari sisi hukum waris, tidak berarti ia bukan anak kandungnya secara hakiki, namun yang dimaksud adalah menafikan akibat-akibat *syar'i*-nya saja, misalnya hukum waris dan memberi nafkah.¹⁴

Para fuqaha (ahli fiqh) berselisih pendapat tentang menikahi wanita yang berzina, ke dalam tiga pendapat :

Pendapat pertama, zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'*iddah*. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Hanya saja,

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lenterta, 2008), hal. 329

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hal. 330



menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini pendapat para ulama Madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua, jika wanita yang dizinahi tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahnya. Dan dia tidak wajib ber'*iddah*. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam Madzhab Hanafi.¹⁵

Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber'*iddah* dengan waktu yang di tetapkan. Ini adalah pendapat Madzhab Maliki dan Hambali.¹⁶

Dilihat dari sisi kebolehan menikahi pezina mengandung suatu kemaslahatan yaitu agar anak yang di kandungnya lahir dengan mempunyai ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya, keharmonisannya dan masa depannya karena dalam hukum islam. Si anak tidak mengandung dosa dan hanya ayah dan ibunya yang menanggung dosa atas perbuatannya.¹⁷ Begitu juga dengan orang tua bagaimanapun juga mereka tidak akan rela melihat putrinya hamil sebelum menikah, mereka ingin kalau cucunya lahir kelak mempunyai ayah yang bertanggung jawab. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya yang telah hamil di luar nikah tersebut.

Hal ini di dasarkan pada teori kemaslahatan, serta demi menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa, karena anak zina bagaimanapun adanya

¹⁵ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qithi Press, 2008), hal. 87

¹⁶ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, , hal. 88

¹⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al Hadisah*, hal . 89



tidak boleh menanggung akibat-akibat hukum yang di timbulkan dari pasangan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab.

Adapun pengaruh pernikahan dapat kita lihat dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut.

1. Menyalurkan naluri seks

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat, keras dan menuntut supaya ada jalan keluarnya. Apabila jalan keluar itu tidak ada, maka kegoncangan jiwa yang dialami manusia akan berakibat buruk dan mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat, maka menikah merupakan jalan keluar yang paling baik dan ma'ruf. Manusia membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya, yaitu nafsu syahwat.¹⁸

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."*¹⁹

2. Menjadikan keturunan (anak-anak) yang mulia

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), Cet. Ke- 9, jilid 6, hal. 153

¹⁹ Al-Baqarah: 233





Anak dari pasangan sumi istri yang sah akan menjadikan kemuliaan bagi keluarga itu sendiri. Dalam berkeluarga, anak mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Tanpa kehadiran seorang anak maka kehidupan akan terasa sepi dan kurang menggairahkan, juga harus diimbangi dengan sikap yang soleh atau terpuji.²⁰

3. Menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan.

Naluri kebapakan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dengan suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah

4. Menimbulkan sikap tanggungjawab

Sikap tanggung jawab akan memupuk kedisiplinan dan rajin dalam suatu hal baik dalam bekerja maupun dalam bidang yang lain, karena Islam menganjurkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal guna memenuhi hajat hidup manusia. Salah satunya adalah untuk memenuhi rumah tangga yang membutuhkan kerja keras, disiplin tinggi, dan disertai tanggung jawab. Seorang bapak sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab akan mengusahakan kebutuhan hidup atau nafkah keluarga, begitu juga seorang ibu yang bertanggungjawab akan menjalankan perannya di dalam rumah tangga dengan baik.

5. Adanya pembagian tugas

²⁰ Aminudin & Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, hal. 23

Dalam rumah tangga suami dan istri mempunyai tugas masing-masing. Tugas seorang suami mencukupi nafkah, dengan bekerja keras dan seorang istri mengurus rumah tangga dengan mendidik anak, menyiapkan masakan dan lain sebagainya. Dengan pembagian ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya sesuai dengan keridhoan Allah SWT.

6. Menimbulkan tali kekeluargaan

Setiap pernikahan menghendaki kekekalan/kelanggengan dan terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera. Rumah tangga yang Islami dapat diwujudkan dengan cara saling toleransi, bantu membantu, dan saling melengkapi antar anggota keluarga. Apabila terjadi suatu masalah yang timbul maka hendaknya dipecahkan bersama dengan cara bermusyawarah.²¹

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan nikah ulang kawin hamil ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kawin hamil di luar nikah.

²¹ Aminudin & Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, hal. 24





2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. Ini bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus dan jelas yaitu peneliti berupaya memaparkan hukum nikah ulang wanita hamil di luar nikah.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif, yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu nikah hamil itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, serta harus di ulang atau tidak. Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosiokultural masyarakat di mana hukum Islam diberlakukan. Pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi perihal perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat,²² khususnya tentang nikah ulang di Desa Astanajapura.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. Ke-3, hal. 34

a. Observasi (penelitian)

Observasi yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau materi yang diteliti dan diselidiki, seperti: pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah oleh KUA dan tokoh masyarakat setempat, kondisi wilayah Desa Astanajapura, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah ulang wanita hamil.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini. Dalam hal ini adalah pegawai KUA, orang tua kedua pasangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat Desa, dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam persoalan ini.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Sedangkan penyusun mengambil catatan-catatan yang berupa buku induk perncatatan pernikahan, buku kelahiran anak, monografi Desa, serta buku-buku referensi yang mendukung skripsi.

5. Analisis data.



Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, talaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini di uraikan tentang gambaran umum pernikahan, kajiannya meliputi : pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, hukum pernikahan, hikmah pernikahan serta tentang tinjauan pernikahan wanita hamil





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB III : Dalam bab ini merupakan gambaran kondisi Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi demografisnya, serta pernikahan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Astanajapura.

BAB IV : Dalam bab ini merupakan analisis terhadap pendapat tokoh masyarakat dan KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, dalam kasus pernikahan ulang di Desa Astanajapura dan KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Sehingga dapat di ketahui hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang hukumnya nikah ulang tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan memperhatikan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut KHI yaitu berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 yang menegaskan bahwa “dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”. Jadi jika seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil, maka tidak perlu diadakannya nikah ulang Sedangkan menurut ulama desa Astanajapura melakukan pernikahan ulang itu di perbolehkan dengan alasan untuk menghilangkan rasa kehati-hatian atau was-was yang adal dalam diri mereka.
2. Para tokoh masyarakat desa Astanajapura membolehkan melakukan nikah ulang dengan alasan untuk menguatkan pernikahan yang pertama dan menghilangkan rasa was-was atau kehati-hatian tetapi anaknya tetap dihukumi anak di luar nikah dan tidak boleh dinasabkan pada bapaknya, dan agar anak yang selanjutnya bukan anak zina. Sedangkan menurut pihak KUA berpendapat tidak boleh melakukan pernikahan ulang yang tanpa cerai terlebih dahulu kecuali dalam kasus isbat nikah karena berpatokan pada KHI.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. SARAN-SARAN

Untuk para orang tua sebaiknya jangan terlalu mudah mempercayai anaknya dan selalu berikan pengawasan karena akibat pergaulan mereka bisa bertindak diluar kontrol dari orang tua mereka.

Kejadian hamil diluar nikah ini tidak terlepas dari pengaruh budaya dan teknologi dari budaya barat yang secara sadar telah menjajah pandangan manusia sehingga terjadi penurunan moral yang sangat tajam. Perilaku generasi sekarang, terutama generasi muda yang semakin kebarat-baratan harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Banyak kita temukan pelanggaran-pelanggaran etika dalam pergaulan yang mereka lakukan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa yang mereka perbuat adalah suatu perbuatan yang keliru, karena hampir semua generasi muda melakukannya dan menjadi sebuah kebiasaan sehingga sesuatu yang seharusnya merupakan sebuah kesalahan atau pelanggaran berubah menjadi sesuatu hal yang biasa. Contohnya adalah fenomena nikah hamil sebagai akibat dari pergaulan bebas yang berkembang dan sangat memprihatinkan di sekitar kita. Serta bagi masyarakat desa Astanajapura sebaiknya tidak perlu melakukan pernikahan ulang jika sudah menikah walaupun dalam keadaan hamil.

Untuk tokoh masyarakat desa Astanajapura serta petugas P3N dan perangkat desa hendaknya aktif memberikan perhatian khusus kepada para pemuda-pemudi agar kasus hamil diluar nikah bisa diminimalisir.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an Al-Karim

Buku:

Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, Jakarta: Qithi Press, 2008

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Aminudin & Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah al hadisah*, Jakarta: Persada, 1995

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Ichsanudin, Agar Diberi Jodoh Terbaik Oleh Allah, Jakarta: Al-Ihsan Media Utama, 2010

Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV AL-Hidayah, 1964

Malahayati, *Ketika Wanita Harus Bersikap*, Semarang: Pustaka Widyamara, 2009

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lenterta, 2008

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1996

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahariyah, 1976

Saebani, Beni Ahmad, dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005

Shihab, M. Quraish, *WAWASAN AL-QURAN, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, <mailto:mizan@ibm.net>



Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah

Tihami dan Sahrani, Sohari, *fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Yango, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005)

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al-Quran, 1973

Jurnal:

JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 17 JANUARI 2010: 143–16, diakses pada tanggal 27 Desember 2014 jam 20:00

Webite:

[http: //www.Rumahfiqih.Com/ust/e2.Php?id=1165371156](http://www.Rumahfiqih.Com/ust/e2.Php?id=1165371156), diakses tanggal 23 September 2014, jam 20:00

[http : //tajdiidunnikah.blogspot.com/](http://tajdiidunnikah.blogspot.com/), diakes tanggal 22 Februari 2015, jam 15:00

[http : //Kitab-koening.blogspot.com/2012/01/tajdid-nikah.html](http://Kitab-koening.blogspot.com/2012/01/tajdid-nikah.html), diakses tanggal 25 Februari 2015, jam 16:00